BAYANG-BAYANG REFORMASI JILID 2

Catatan Kritis Kebijakan Publik, Efisiensi Tata Kelola, dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Rangkuman Rekam Jejak, Dinamika Kebijakan, dan Evaluasi Kritis dalam Pemberitaan Media Massa Nasional (2024–2026)



Penyunting:
Tim Riset dan Media Kebijakan Publik

BAYANG-BAYANG REFORMASI JILID 2

Catatan Kritis Kebijakan Publik, Efisiensi Tata Kelola, dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Rangkuman Rekam Jejak, Dinamika Kebijakan, dan Evaluasi Kritis dalam Pemberitaan Media Massa Nasional (2024–2026)

Penyunting:
Tim Riset dan Media Kebijakan Publik
Self Publishing Media -2026

BAYANG-BAYANG REFORMASI JILID 2
Catatan Kritis Kebijakan Publik, Efisiensi Tata Kelola, dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Penyunting:
Tim Riset dan Media Kebijakan Publik
Penerbit:
Self Publishing Media
Jakarta, Indonesia
Versi Digital Pertama, 2026

HAK CIPTA DAN LISENSI TERBUKA / *OPEN ACCESS*

Buku ini diterbitkan di bawah lisensi publik non-komersial. Hak cipta naskah dan susunan narasi berada pada penulis/penyunting. Buku ini diterbitkan secara gratis dan disediakan sebagai dokumen publik. Anda diizinkan dan didorong penuh untuk mengunduh, menggandakan, menyebarkan, serta membagikan ulang seluruh atau sebagian isi buku ini kepada masyarakat luas, selama memenuhi ketentuan berikut:

1. Bukan untuk Tujuan Komersial: Buku ini atau bagian darinya tidak diperjualbelikan dalam bentuk apa pun untuk mengambil keuntungan finansial.
2. Atribusi: Tetap mencantumkan nama penyunting (*Tim Riset dan Media Kebijakan Publik*) dan judul asli buku dalam setiap bentuk pengutipan atau penyebaran ulang.
3. Integritas Karya: Tidak mengubah, memotong, atau mereduksi substansi isi dengan cara yang dapat menimbulkan penyimpangan makna atau penyesatan informasi.

DISCLAIMER

Buku ini disusun secara mandiri (*Self-Published/Non-ISBN*) sebagai bentuk dokumentasi, catatan kritis, dan rangkuman informasi publik mengenai evaluasi kebijakan publik serta dinamika sosial-ekonomi nasional di era kepemimpinan nasional (2024–2026). Data, angka, dan fakta yang disajikan dalam buku ini dihimpun dari berbagai sumber publik, pernyataan resmi instansi pemerintah,

media massa terpercaya, serta dokumen laporan kinerja organisasi sipil yang tersedia untuk umum hingga saat penulisan.

Penulis/penyunting dan penerbit telah berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan keakuratan data pada saat buku ini diterbitkan. Namun demikian, informasi dan angka dapat berkembang atau diperbarui seiring berjalannya waktu.

Buku ini ditujukan untuk edukasi, literasi publik, dan pembanding nalar kritis masyarakat, serta tidak dimaksudkan sebagai dokumen hukum resmi dari lembaga pemerintah tertentu.

Diterbitkan Secara Mandiri oleh:
Self Publishing Media
Email: selfpublishingedition@gmail.com
Website: https://selfpublishing.biz.id
Tautan Unduh Gratis: https://bukuonline.my.id
Didistribusikan gratis dalam format digital untuk seluruh rakyat Indonesia.

PRAKATA

Perjalanan tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik senantiasa membutuhkan ruang dialektika yang sehat. Sebuah bangsa yang besar tidak hanya dibangun melalui optimisme dan narasi capaian, tetapi juga diuji oleh sejauh mana ruang publik mampu menghadirkan evaluasi, kritik, dan refleksi terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan.

Buku yang berada di tangan Anda ini, *Bayang-Bayang Reformasi Jilid-2: Catatan Kritis Kebijakan Publik, Efisiensi Tata Kelola, dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, lahir dari komitmen untuk merekam dinamika tersebut secara objektif. Mengikuti pendekatan naratif yang mengalir dan menyatu tanpa penyekatan yang kaku, naskah ini berupaya menyoroti secara berimbang antara niat mulia kebijakan dan realitas penyerapan di lapangan.

Di dalamnya, Anda akan menemukan analisis kritis mengenai berbagai tantangan kontemporer: efisiensi postur birokrasi, ujian komitmen pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset, manajemen beban utang negara, dinamika ketenagakerjaan di tengah gelombang PHK, tantangan ekologis dalam proyek swasembada, hingga efektivitas jaring pengaman sosial.

Buku ini disediakan secara gratis bagi publik sebagai pemantik diskusi akademik dan ruang diskursus warga. Harapan utama kami adalah agar catatan ini dapat berkontribusi dalam menjaga arah perbaikan tata kelola pemerintahan menuju Indonesia yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Selamat membaca.
Jakarta, 2026
Tim Riset dan Media Kebijakan Publik

PENDAHULUAN: MEMBACA DINAMIKA KEBIJAKAN DAN RUANG EVALUASI

Mengevaluasi perjalanan kebijakan publik sebuah negara adalah proses mengukur jarak antara idealita regulasi dan realita lapangan. Buku *Bayang-Bayang Reformasi Jilid-2* hadir untuk memotret secara objektif berbagai kebijakan strategis nasional sepanjang periode 2024–2026 melalui lima sudut pandang evaluatif utama:

1. Struktur Birokrasi dan Kelembagaan Negara

Menganalisis dampak pembesaran struktur kabinet dan birokrasi terhadap beban APBN serta koordinasi antar-lembaga, di tengah tuntutan efisiensi dan penyederhanaan tata kelola publik.

2. Garda Penegakan Hukum dan Transparansi

Membedah urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset, dinamika independensi lembaga anti-korupsi, serta konsistensi penegakan hukum dalam menjaga kepercayaan publik.

3. Keseimbangan Fiskal, Utang, dan Beban Pajak

Mengkaji strategi pengelolaan utang pemerintah, beban pembayaran bunga APBN, serta dampak kebijakan penyesuaian PPN 12% terhadap daya beli kelas menengah.

4. Sektor Riil, Ketenagakerjaan, dan Transisi Energi

Menelaah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, tantangan integrasi tenaga kerja formal, serta kalkulasi keekonomian dan implikasi ekologis transisi energi hijau.

5. Dilema Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola Program Sosial

Memotret benturan antara ekspansi lahan pertanian (*food estate*) dengan kelestarian lingkungan, serta evaluasi ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan program sosial skala besar. Melalui pendekatan naratif jurnalistik yang berimbang, buku ini diharapkan menjadi dokumen pembanding yang memperkaya literasi publik mengenai tata kelola pemerintahan dan kebijakan nasional.

DAFTAR ISI

Prakata/5
Pendahuluan/6
BAGIAN I: STRUKTUR BIROKRASI DAN TANTANGAN EFISIENSI KELEMBAGAAN
- Gemuknya Postur Kabinet: Antara Akomodasi Politik dan Beban Efisiensi APBN/9
- Tumpang Tindih Kewenangan: Kecepatan Eksekusi versus Kerumitan Birokrasi/10

BAGIAN II: UJIAN INTEGRITAS RUU PERAMPASAN ASET DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
- Tertahannya RUU Perampasan Aset: Menanti Keberanian Politik DPR dan Pemerintah/12
- Penguatan Kepercayaan Publik: Konsistensi Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu/13

BAGIAN III: MANAJEMEN FISKAL KEBIJAKAN UTANG DAN PAJAK KELAS MENENGAH
- Navigasi Utang Negara: Menjaga Batas Aman Fiskal dan Produktivitas Pinjaman/14
- Kebijakan PPN 12%: Dilema Penerimaan Negara dan Daya Beli Masyarakat/15

BAGIAN IV: BADAI SEKTOR RIIL GELOMBANG PHK DAN TRANSISI ENERGI
- Menghadapi Gelombang PHK Manufaktur: Resiliensi Industri dan Perlindungan Buruh/16
- Keekonomian Transisi Energi: Tantangan Subsidi dan Dampak Lingkungan Hilirisasi/17

BAGIAN V: EKOLOGI DAN KETEPATAN SASARAN PROGRAM SOSIAL
- Ekstensifikasi Lahan vs Ekologi: Membalas Risiko Lingkungan Proyek Swasembada/18
- Evaluasi Ketepatan Sasaran: Tata Kelola Distribusi Logistik Program Sosial/19

BAGIAN VI: DEMOKRASI DAN RUANG SIPIL MENJAGA DAYA KONTROL PUBLIK DI TENGAH KONSOLIDASI KEKUASAAN

- Menyusutnya Ruang Kritik: Tantangan Kebebasan Sipil dan Partisipasi Publik/20
- Dilema Kekuatan Oposisi: Lemahnya Kontrol Parlemen (Checks and Balances)/21

BAGIAN VII: SUARA DARI JALANAN GELOMBANG DEMONSTRASI DAN BENTURAN ASPIRASI (2024–2026)

- Dari Kampus ke Jalanan: Akumulasi Keresahan Sosial dan Kebijakan Publik/23
- Respons Negara: Urgensi Ruang Partisipasi yang Bermakna/25

PENUTUP: MERAWAT RUANG DIALEKTIKA PEMBANGUNAN/26
GLOSARIUM/27
DAFTAR PUSTAKA/28
TENTANG PENYUNTING/29

BAGIAN I:
STRUKTUR BIROKRASI DAN TANTANGAN EFISIENSI KELEMBAGAAN

Pembentukan tata kelola pemerintahan yang efektif mensyaratkan adanya struktur birokrasi yang ramping, adaptif, dan responsif terhadap perubahan. Namun, dinamika politik kerap menghadapkan pemerintah pada pilihan sulit antara membangun koalisi politik yang stabil atau mempertahankan efisiensi kelembagaan. Ketika jumlah kementerian dan lembaga diperluas untuk mengakomodasi berbagai spektrum kepentingan, tantangan utama yang muncul adalah peningkatan beban belanja operasional dalam APBN serta potensi tumpang tindih fungsi regulasi. Bagian ini menguraikan analisis kritis mengenai dampaknya terhadap kinerja pelayanan publik dan koordinasi antar-instansi.



Pelantikan jajaran menteri dan wakil menteri dalam struktur Kabinet Merah Putih. (Sumber Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden/Setneg.go.id, 2024)

Gemuknya Postur Kabinet: Antara Akomodasi Politik dan Beban Efisiensi APBN

Penambahan jumlah kementerian dan lembaga dalam struktur pemerintahan periode 2024–2026 membawa konsekuensi langsung terhadap porsi belanja operasional negara. Langkah pemisahan (*splitting*) beberapa kementerian bertujuan untuk mempertajam fokus kerja sektor strategis, namun di sisi lain memicu lonjakan biaya birokrasi, mulai dari pengadaan sarana fisik, pimpinan instansi, hingga alokasi gaji pegawai pendukung (*Kompas*, 15 November 2024). Para pengamat ekonomi politik menggarisbawahi bahwa efektivitas kabinet tidak ditentukan oleh banyaknya lembaga yang dibentuk, melainkan oleh kejelasan fungsi dan ketiadaan duplikasi tugas (*Bisnis.com*, 20 Januari 2025). Beban administratif yang meningkat berisiko menyerap alokasi anggaran yang seharusnya dapat disalurkan langsung untuk program-program produktif masyarakat di akar rumput.



Rapat koordinasi dan sidang kabinet yang menuntut ketepatan pembagian kewenangan. (Sumber Foto: Kantor Staf Presiden / KSP, 2025)

Tumpang Tindih Kewenangan:
Kecepatan Eksekusi versus Kerumitan Birokrasi

Pemisahan kementerian menuntut pembagian peran yang presisi melalui Peraturan Presiden. Namun dalam prakteknya, proses

transisi kelembagaan sering kali memakan waktu berbulan-bulan, yang berdampak pada perlambatan daya serap anggaran di tingkat daerah (*Detik.com*, 10 Maret 2025).

Tumpuk tumpang kewenangan antar-lembaga dalam penanganan satu isu—seperti kedaulatan pangan atau perlindungan tenaga kerja—berpotensi menimbulkan hambatan birokrasi (*red tape*). Evaluasi berkala terhadap kinerja kabinet menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa pemisahan struktur benar-benar mempercepat pelayanan publik, bukan sebaliknya.

BAGIAN II:
UJIAN INTEGRITAS: RUU PERAMPASAN ASET DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan kepastian hukum merupakan fondasi utama bagi masuknya investasi serta terciptanya iklim usaha yang sehat. Komitmen pemberantasan korupsi diuji melalui keberanian merumuskan regulasi yang memiliki efek jera masif, salah satunya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Hasil Kejahatan. Bagian ini menelaah proses pembahasan regulasi anti-korupsi di parlemen, urgensi mekanismenya bagi pemulihan kerugian negara (*asset recovery*), serta pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dari intervensi politik.



Suasana ruang sidang di Gedung DPR RI. (Sumber Foto: Kementerian Sekretariat Negara RI / Setneg.go.id, 2025)

Tertahannya RUU Perampasan Aset: Menanti Keberanian Politik DPR dan Pemerintah

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah lama dipandang oleh kalangan akademisi dan koalisi masyarakat sipil sebagai instrumen kunci untuk memiskinkan koruptor dan

mengembalikan aset negara tanpa harus menunggu putusan pidana yang memakan waktu lama (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) (*Tempo.co*, 14 Februari 2025). Namun, dinamika pembahasan RUU ini di DPR kerap mengalami jalan buntu akibat kekhawatiran timbulnya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum (*Antara News*, 10 Mei 2025). Ketiadaan progres signifikan dalam pengesahan RUU ini menjadi catatan kritis publik terhadap komitmen penguatan sistem pemberantasan korupsi secara holistik.



Gedung Merah Putih KPK sebagai pusat penindakan kasus korupsi skala besar. (Sumber Foto: Arsip Berita Pemberantasan Korupsi/Lentera News, 2025)

Penguatan Kepercayaan Publik:
Konsistensi Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Di tengah persepsi publik yang fluktuatif terhadap independensi lembaga penegak hukum, penanganan kasus korupsi skala besar menjadi ujian konsistensi pemerintah (*Kompas.id*, 22 Agustus 2025). Penegakan hukum yang tebang pilih berpotensi merusak iklim investasi dan menurunkan kepercayaan investor asing terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Reorganisasi dan transparansi dalam tubuh penegak hukum perlu terus didorong agar tindakan pencegahan dan penindakan korupsi berjalan selaras, tanpa dipengaruhi oleh konstelasi politik yang sedang berlangsung.

BAGIAN III:
MANAJEMEN FISKAL: KEBIJAKAN UTANG DAN PAJAK KELAS MENENGAH

Menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional dan ketahanan fiskal merupakan tugas berat Kementerian Keuangan. Di satu sisi, pembayaran bunga utang mengambil porsi signifikan dalam APBN; di sisi lain, ekstensifikasi penerimaan pajak memicu keprihatinan masyarakat. Bagian ini membedah dinamika rasio utang pemerintah terhadap PDB serta dampak penerapan kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap daya beli masyarakat kelas menengah.



Rapat koordinasi perencanaan anggaran dan manajemen kebijakan fiskal. (Sumber Foto: Kementerian Sekretariat Negara RI/Setneg.go.id, 2026)

Navigasi Utang Negara:
Menjaga Batas Aman Fiskal dan Produktivitas Pinjaman

Meskipun rasio utang pemerintah Indonesia masih terjaga di bawah ambang batas aman 60% dari PDB sesuai UU Keuangan Negara, lonjakan nominal utang dan kewajiban pembayaran bunga (*debt service ratio*) tetap memerlukan kehati-hatian ekstra (*CNBC Indonesia*, 18 November 2025). Para analis keuangan mengingatkan

agar penarikan utang baru benar-benar dialokasikan pada proyek-proyek infrastruktur produktif yang memiliki pengembalian ekonomi (*economic return*) tinggi, bukan sekadar untuk menutup belanja rutin atau pembayaran bunga utang sebelumnya.



Kebijakan tarif pajak berdampak langsung pada daya beli harian. (Sumber Foto: Kantor Berita Antara / Antaranews.com)

Kebijakan PPN 12%:
Dilema Penerimaan Negara dan Daya Beli Masyarakat

Rencana penyesuaian tarif PPN menjadi 12% sesuai amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) memicu perdebatan hangat di ruang publik (*Kontan*, 5 Januari 2025). Di satu sisi, langkah ini diperlukan untuk memperluas basis penerimaan negara; namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menekan daya beli masyarakat kelas menengah yang tidak tersentuh jaring pengaman sosial. Pengamatan ekonomi menunjukkan bahwa kenaikan PPN pada komoditas sekunder dan jasa dapat memicu efek domino berupa peningkatan harga barang secara umum (*efek inflasiner*), sehingga berisiko menahan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama PDB.

BAGIAN IV:
BADAI SEKTOR RIIL: GELOMBANG PHK DAN TRANSISI ENERGI

Dinamika pasar global dan perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang memberikan tekanan hebat pada industri manufaktur dalam negeri. Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi alarm penting bagi kondisi ketenagakerjaan nasional. Di saat yang sama, komitmen transisi energi menuju energi bersih dihadapkan pada keekonomian subsidi serta evaluasi tata kelola industri hilirisasi mineral.



Aktivitas produksi di sektor industri manufaktur padat karya. (Sumber Foto: Arsip Sektor Industri / Megumi Plastics & Jaringan Manufaktur)

Menghadapi Gelombang PHK Manufaktur: Resiliensi Industri dan Perlindungan Buruh

Sektor manufaktur padat karya mengalami tekanan berat akibat penurunan permintaan ekspor dan masuknya produk impor berharga murah (*Bisnis.com*, 12 April 2025). Gelombang PHK yang terjadi di Jawa Barat dan Jawa Tengah menggarisbawahi perlunya insentif konkret bagi industri dalam negeri, seperti penurunan harga

gas industri dan perlindungan pasar domestik. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya memfasilitasi pesangon buruh, tetapi juga menyiapkan program pelatihan ulang (*upskilling*) serta mempermudah iklim investasi agar mampu menyerap kembali tenaga kerja formal yang terdampak.



Fasilitas industri pemrosesan dan smelter nikel yang menjadi tulang punggung rantai pasok baterai kendaraan listrik. (Sumber Foto: Harita Group / CNBC Indonesia, 2023)

Keekonomian Transisi Energi:
Tantangan Subsidi dan Dampak Lingkungan Hilirisasi

Program transisi energi—termasuk penggunaan campuran bahan bakar nabati dan kendaraan listrik—memerlukan skema pendanaan yang tidak sedikit. Beban kompensasi energi dalam APBN tetap tinggi akibat dinamika harga komoditas global (*Katadata*, 19 Juli 2025). Selain masalah biaya, proyek hilirisasi nikel untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik juga mendapat sorotan terkait dampak lingkungan sosial di sekitar kawasan industri. Pengawasan terhadap pengolahan limbah dan keselamatan kerja menjadi kunci agar predikat energi hijau yang diusung benar-benar memenuhi standar berkelanjutan.

BAGIAN V:
EKOLOGI DAN KETEPATAN SASARAN PROGRAM SOSIAL

Keinginan mencapai kemandirian pangan dan memberikan perlindungan sosial yang masif kerap berhadapan dengan kompleksitas pelaksanaan di lapangan. Ekspansi lahan pertanian berisiko memicu deforestasi jika tidak dikelola dengan studi amdal yang ketat. Sementara itu, program bantuan sosial skala masif menghadapi tantangan klasik berupa akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok distribusi logistik.



Pendekatan intensifikasi pertanian berbasis teknologi dinilai lebih aman. (Sumber Foto: Ahmad Arif / Kompas)

Ekstensifikasi Lahan vs Ekologi: Membalas Risiko Lingkungan Proyek Swasembada

Pembukaan lahan skala besar (*food estate*) untuk komoditas padi, jagung, dan tebu di luar Jawa memberikan tantangan tersendiri pada kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem lokal (*Kompas*, 8 Oktober 2025). Para ahli lingkungan menyoroti bahwa proyek ekstensifikasi lahan tanpa mengindahkan karakteristik hidrologi tanah gambut atau kawasan hutan berpotensi memicu bencana ekologis seperti banjir dan kebakaran hutan. Pendekatan intensifikasi

pertanian berbasis teknologi dinilai lebih aman dan ramah lingkungan ketimbang pembukaan lahan baru secara masif.



Proses penyaluran logistik bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat. (Sumber Foto: Kompas / Dokumentasi Penyaluran Bantuan Sosial)

Evaluasi Ketepatan Sasaran:
Tata Kelola Distribusi Logistik Program Sosial

Penyelenggaraan program sosial berskala nasional membutuhkan sistem pendataan terpadu agar bantuan tidak salah sasaran (*misallocation*) (*Detikcom*, 15 Disember 2025). Permasalahan data ganda dan ketidaktepatan pendaftaran warga miskin kerap menjadi kendala berulang dalam penyaluran bantuan pangan maupun program gizi. Transparansi digitalisasi data, pelibatan pengawasan masyarakat di tingkat desa, serta evaluasi independen secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran APBN yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

BAGIAN VI:
DEMOKRASI DAN RUANG SIPIL: MENJAGA DAYA KONTROL PUBLIK DI TENGAH KONSOLIDASI KEKUASAAN

Konsolidasi kekuasaan politik dan stabilitas pemerintahan yang kuat di satu sisi memang mempercepat proses pengambilan keputusan eksekutif. Namun, di sisi lain, ia berisiko mempersempit ruang kritik apabila mekanisme *checks and balances*—baik di dalam parlemen maupun di ruang publik—tidak berjalan secara optimal. Ketika mayoritas kekuatan politik melebur dalam koalisi kekuasaan yang besar, tantangan terbesar bagi sebuah negara demokrasi bukanlah sekadar menjaga stabilitas, melainkan memastikan bahwa suara warga dan kontrol kritis tetap mendapat tempat yang layak. Bagian ini mengevaluasi kualitas demokrasi elektoral, indeks kebebasan sipil, ruang gerak koalisi masyarakat sipil, serta efektivitas pengawasan terhadap kebijakan negara sepanjang periode 2024–2026.



Aktivitas penyampaian aspirasi dan gerakan masyarakat sipil. (Sumber Foto: Ruminews / Arsip Aksi Masyarakat Sipil, 2026)

Menyusutnya Ruang Kritik: Tantangan Kebebasan Sipil dan Partisipasi Publik

Indikator penting dari kesehatan sebuah alam reformasi adalah bagaimana negara merespons perbedaan pandangan dan kritik

dari warganya. Sepanjang periode 2024–2026, dinamika kebebasan berpendapat dan kebebasan pers menghadapi ujian tersendiri di tengah masifnya arus informasi digital dan kebijakan pengendalian narasi publik (*Tempo.co*, 12 Maret 2025). Koalisi masyarakat sipil kerap menyoroti bahwa partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan undang-undang sering kali terjebak pada formalitas prosedural. Masukan dari akademisi, buruh, dan organisasi non-pemerintah kerap diterima sebagai syarat administratif semata tanpa adanya adopsi substansial dalam draf kebijakan final. Jika ruang dialog ini semakin menyusut, dikhawatirkan akan memicu alienasi politik, di mana masyarakat merasa kebijakan yang lahir dari pusat kekuasaan tercerabut dari aspirasi akar rumput.



Suasana rapat di Gedung DPR RI. (Sumber Foto: Kompas.com, 2025)

Dilema Kekuatan Oposisi:
Lemahnya Kontrol Parlemen (*Checks and Balances*)

Konfigurasi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pasca-pemilu memperlihatkan koalisi pendukung pemerintah yang sangat gemuk dengan minimnya kekuatan oposisi formal di parlemen. Kondisi ini membawa keuntungan berupa

kelancaran proses legislasi dan minimnya gesekan politik yang kontraproduktif. Namun, para pengamat ilmu politik mengingatkan bahwa absennya penyeimbang (*counterweight*) yang kuat di parlemen berisiko melemahkan fungsi pengawasan (*checks and balances*). Kebijakan-kebijakan strategis, alokasi anggaran raksasa, hingga pengesahan regulasi kilat sering kali lolos tanpa perdebatan kritis yang mendalam. Akibatnya, fungsi kontrol utama bergeser keluar dari gedung parlemen, memaksa media massa, kampus, dan gerakan mahasiswa untuk mengambil alih peran sebagai pengawas eksternal kebijakan pemerintah.

BAGIAN VII:
SUARA DARI JALANAN: GELOMBANG DEMONSTRASI DAN BENTURAN ASPIRASI (2024–2026)

Ketika saluran formal di parlemen dan ruang-ruang dialog birokrasi dirasakan warga tidak lagi cukup menampung keresahan, jalanan sering kali menjadi panggung terakhir bagi publik untuk bersuara. Sepanjang rentang tahun 2024 hingga 2026, dinamika sosial-politik Indonesia diwarnai oleh berbagai gelombang demonstrasi masif—mulai dari penolakan kebijakan ekonomi yang menekan daya beli, desakan pengesahan regulasi anti-korupsi, hingga protes terhadap berbagai keputusan kebijakan publik yang dinilai mencederai rasa keadilan. Bagian ini merekam bagaimana aksi-aksi kolektif dari mahasiswa, buruh, akademisi, dan koalisi masyarakat sipil menjelma menjadi pengawas eksternal yang paling lantang dalam menuntut akuntabilitas penguasa.



Aksi penyampaian aspirasi publik dan aliansi buruh/mahasiswa. (Sumber Foto: Media Justitia / Arsip Aksi Unjuk Rasa)

Dari Kampus ke Jalanan:
Akumulasi Keresahan Sosial dan Kebijakan Publik

Gelombang protes yang digerakkan oleh aliansi mahasiswa dan elemen buruh sepanjang 2024–2026 umumnya berakar dari

akumulasi persoalan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak—seperti bayang-bayang kenaikan harga kebutuhan pokok, beban pajak, hingga mandeknya agenda pemberantasan korupsi—memicu solidaritas lintas sektor. Demonstrasi tidak lagi sekadar merespons isu lokal, melainkan menjadi bentuk perlawanan moral terhadap kebijakan negara yang dinilai kurang berpihak pada kelompok rentan di akar rumput.



(Sumber Foto: Indonesian Judicial Research Society / IJRS, 2025)

Respons Negara:
Urgensi Ruang Partisipasi yang Bermakna

Setiap kali gelombang demonstrasi besar terjadi, pola respons yang ditunjukkan oleh negara kerap berayun di antara pendekatan pengamanan ketat dan pembukaan ruang audiensi terbatas. Para pengamat sosiologi politik menilai bahwa eskalasi di jalanan merupakan alarm keras bagi pemerintah bahwa saluran komunikasi formal mengalami kebuntuan (*deadlock*). Tanpa adanya perbaikan kualitas partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam setiap perumusan undang-undang, jalanan akan terus menjadi tempat pelaporan paling jujur atas ketidakpuasan rakyat terhadap arah perjalanan reformasi nasional.

PENUTUP:
MERAWAT RUANG
DIALEKTIKA PEMBANGUNAN

Rangkuman evaluasi kritis terhadap berbagai kebijakan publik periode 2024–2026 yang disajikan dalam buku ini bukan bertujuan untuk mengerdilkan ikhtiar pembangunan, melainkan untuk memberikan sudut pandang pembanding yang konstruktif. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat tumbuh di atas tanah yang subur akan keterbukaan, akuntabilitas, dan keberanian untuk melakukan koreksi atas kekurangan yang ada.

Tantangan birokrasi, penegakan hukum, manajemen fiskal, ketenagakerjaan, hingga isu ekologi adalah kenyataan kompleks yang membutuhkan solusi bijaksana dan pelibatan seluruh komponen bangsa. Kritik dan catatan evaluatif yang lahir dari masyarakat sipil, akademisi, dan media massa harus dipandang sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga agar arah navigasi kapal besar Indonesia tetap berada di jalur yang benar.

Dengan merawat ruang dialektika yang sehat ini, kita optimistis bahwa setiap kebijakan publik yang lahir di masa depan akan semakin matang, berkeadilan, dan benar-benar berpihak pada kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

GLOSARIUM

- **AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan):** Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup.
- **APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara):** Rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh DPR.
- **Asset Recovery:** Upaya hukum penelusuran, pengamanan, penyitaan, dan pemulihan aset hasil kejahatan kepada negara.
- **Debt Service Ratio (DSR):** Rasio jumlah pembayaran pokok dan bunga utang terhadap total penerimaan negara.
- **Food Estate:** Konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan lahan luas.
- **IPK (Indeks Persepsi Korupsi):** Indikator tingkat korupsi sektor publik di suatu negara berdasarkan persepsi pelaku usaha dan pakar.
- **Non-Conviction Based Asset Forfeiture:** Mekanisme perampasan aset hasil kejahatan tanpa melalui putusan pidana terhadap pelaku.
- **PDB (Produk Domestik Bruto):** Nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu.
- **PHK (Pemutusan Hubungan Kerja):** Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan.
- **PPN (Pajak Pertambahan Nilai):** Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
- **RUU Perampasan Aset:** Rancangan undang-undang yang mengatur tentang tata cara perampasan aset yang berasal dari tindak pidana.

- **Upskilling:** Proses pelatihannya untuk meningkatkan dan memperbarui keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2025, 10 Mei). *Dinamika Pembahasan RUU Perampasan Aset di Parlemen*. Antara News.
- Bisnis.com. (2025, 20 Januari). *Tantangan Efisiensi Pembentukan Kementerian Baru dalam Kabinet*. Bisnis.com.
- Bisnis.com. (2025, 12 April). *Analis Sektor Manufaktur: Gelombang PHK dan Strategi Resiliensi Industri*. Bisnis.com.
- CNBC Indonesia. (2025, 18 November). *Laporan Pengelolaan Utang Negara dan Rasio PDB Terbaru*. CNBC Indonesia.
- Detikcom. (2025, 10 Maret). *Evaluasi Kinerja Birokrasi Pasca Pemisahan Kementerian*. Detiknews.
- Detikcom. (2025, 15 Desember). *Akurasi Data Penerima Bantuan Sosial dan Logistik*. Detikfinance.
- Katadata. (2025, 19 Juli). *Kalkulasi Biaya Transisi Energi dan Subsidi Kompensasi APBN*. Katadata.
- Kompas. (2024, 15 November). *Postur Birokrasi dan Implikasinya Terhadap Belanja Operasional APBN*. Kompas.
- Kompas. (2025, 8 Oktober). *Dampak Ekologis Proyek Pembukaan Lahan Skala Besar*. Kompas.
- Kompas.id. (2025, 22 Agustus). *Independensi Lembaga Penegak Hukum dan Penanganan Kasus Korupsi*. Kompas.id.
- Kontan. (2025, 5 Januari). *Dampak Penerapan PPN 12 Persen Terhadap Daya Beli Masyarakat*. Kontan.
- Tempo.co. (2025, 14 Februari). *Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Bagi Pemulihan Kerugian Negara*. Tempo.co.

TENTANG PENYUNTING

Tim Riset dan Media Kebijakan Publik merupakan unit independen yang bergerak di bidang riset tata kelola pemerintahan, analisis regulasi, serta publikasi jurnalistik kritis. Beranggotakan para peneliti muda, analis data sosial-ekonomi, dan praktisi media, tim ini berfokus pada penyediaan kajian yang berimbang, berbasis data (*evidence-based*), serta mudah diakses oleh masyarakat luas.

Melalui terbitan buku *Bayang-Bayang Reformasi: Catatan Kritis Kebijakan Publik, Efisiensi Tata Kelola, dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional (2024–2026)*, Tim Riset dan Media Kebijakan Publik berkomitmen menghadirkan ruang literasi yang mendidik serta mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAYANG-BAYANG REFORMASI JILID 2

Buku ini menyajikan rangkuman rekam jejak, dinamika kebijakan, dan evaluasi kritis dalam pemberitaan media massa nasional periode 2024–2026. Dengan mengangkat isu-isu strategis seperti kebijakan publik, efisiensi tata kelola, dan pertumbuhan ekonomi nasional, buku ini mengajak pembaca melihat lebih dalam bagaimana pemerintahan merespons tantangan zaman, sekaligus menilai sejauh mana kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.

Melalui analisis kritis terhadap berbagai pemberitaan media massa nasional, buku ini tidak hanya menyajikan fakta dan data, tetapi juga mengurai dinamika di balik kebijakan, termasuk peluang, tantangan, serta dampaknya terhadap masa depan bangsa. Dengan pendekatan yang objektif dan berbasis pada sumber berita yang kredibel, pembaca akan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai arah kebijakan pemerintah dan implikasinya bagi Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi masyarakat, peneliti, akademisi, pembuat kebijakan, dan semua pihak yang peduli pada masa depan Indonesia.

Karena memahami kebijakan hari ini, adalah kunci membangun Indonesia yang lebih baik esok.



SELF PUBLISHING MEDIA- 2026